

Kutut Suwondo

Pendidikan Politik di Aras Desa Harus Dilakukan

PENGANTAR

Mengusung isu demokrasi pada aras kota yang sebagian wilayahnya merupakan pemekaran bukan perkara mudah. Belum lagi kehadiran civil society organization yang masih tergagap-gagap dalam membangun suatu agenda advokasi terhadap praktik distorsi good governance di Kota Salatiga. Untuk mengetahui secara lebih utuh bagaimana sebenarnya peta dinamika civil society di antara kepentingan pada aras kelurahan bekas desa, rendahnya intensitas CSO untuk membangun agenda aksi bersama, profil partai yang lemah dalam membangun infrastruktur politik, maka Jurnal Renai mencoba menelusuri lebih jauh bagaimana duduk soal peta sosial-politik di atas dari perspektif seorang Kutut Suwondo sebagai peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial UKSW. Ia dikenal sebagai seorang yang memberi perhatian terhadap dinamika politik lokal, khususnya di Kota Salatiga. Dalam wawancara berikut akan disajikan bagaimana sebuah konstruksi infrastruktur politik seharusnya hadir dalam tradisi demokrasi di aras local. Berikut petikan wawancara Jurnal Renai, melalui Sdr. Nick. T. Wiratmoko yang mewawancarai Dr. Ir. Kutut Suwondo, MS.

Renai (R): *Bagaimana bisa dijelaskan bagaimana potret arena publik dan politik pada aras desa/kota di kota Salatiga?*

Kutut Suwondo (KS): Kasusnya ada di Salatiga dan Poloboga, Kalibening dan Randuacir yang masih berstatus desa di kabupaten Semarang. Di ketiga Desa ini dulu Forsa pernah melakukan program yang disebut pendemokratisasian. Saya melihat dari segi proses-proses pembangunan. Dalam model Desa, peran Kepala Desa dalam perumusan pembangunan sangat besar, bahkan bisa dikatakan sangat menentukan sekali. Ada wilayah-wilayah yang dekat dengannya, yang memang mendukung dia dalam pemilu. Ada wilayah yang mendukung ketika dia menjadi lurah, itu diberi lebih banyak fasilitas. Tetapi desa-desa yang

menerus dalam agenda pembangunan karena dia membutuhkan itu dari segi untuk menjaga kelangsungan yang akan datang, ketika ada pemilihan-pemilihan lagi, maka dia menggunakan kekuasaannya itu untuk mengatur daerah dukuh. Sedangkan RT/RW itu belum maju. Itu yang pertama. Jadi dengan sistem desa, kepala desa memiliki kewenangan yang besar untuk merealisasikan maksud tertentu. Hal ini biasanya dikaitkan dengan pemilihan kepala desa (pilkades).

R: *Kalau benar kewenangan kepala desa de desa sangat besar, bagaimana dengan kekuatan BPD (Badan Perwakilan Desa) yang diatur oleh UU 22/1999 tentang pemerintahan Daerah yang khususnya mengatur desa?*

misalnya, beberapa BPD muncul sebagai kekuatan kontrol terhadap lurah. Bahkan bisa dikatakan dengan melakukan kontrol yang keras. Tetapi ada beberapa daerah yang peran BPD-nya belum terlalu kuat dan kalah wibawa dibandingkan yang ditampilkan sang lurah. Sebab itu, kuat-lemahnya kekuatan alternatif sangat tergantung dari kewibawaan, kemampuan, keberanian, dan "kepremanan" BPD untuk mengontrol kekuasaan kepala desa yang cenderung menggunakan kekuasaannya untuk kepentingannya pribadi. Bagi desa-desa yang sudah maju, kontrol BPD terhadap lurah memang menjadi lebih kuat. Hanya saja, konflik yang terjadi di situ kemudian berkepanjangan juga, seperti di Desa Wunut. Dalam hal ini, memang kemudian tergantung bagaimana kepala desa kemudian bermain dengan BPDnya. Sementara di daerah lain, BPD-nya justru dimainkan oleh kepala desanya. Sebab itu, relasi seimbang-tidaknya antara kepala desa dan BPD sangat tergantung kepemimpinan yang dikembangkan di desa tersebut.

R : Kalau diasumsikan bahwa pamong desa beserta perangkatnya dikategorikan sebagai representasi negara pada aras lokal dan cukup kuat posisinya, lantas bagaimana dengan representasi kedaulatan rakyat desa?

KS : Saya melihat bahwa pola BPD itu menyebabkan infrastruktur politik di aras lokal menjadi lebih bagus. Mestinya, dengan kehadiran BPD ia akan menjadi lebih dekat dengan rakyat sebagai institusi penyaluran inspirasi dan sekaligus menampungnya. Tetapi justru yang terjadi adalah bahwa BPD tidak pernah melakukan rapat pada aras dukuh untuk mengambil aspirasi. Proses pengembangan infrastruktur politik di aras desa tidak terbentuk dan menurut saya juga tidak ada kemauan untuk membentuk itu. Diharapkan dengan munculnya mekanisme pemilu yang lebih bervariasi semacam ini, infrastruktur politik di aras lokal

ada di desa dalam bentuk kelembagaan ranting dan yang menang seharusnya dia bisa menangkap aspirasi dan menyalurkan aspirasi ini ke BPD pada aras desa atau langsung ke tingkat kabupaten kota. Ini menurut hemat saya lemah, sehingga kalau BPD dianggap sebagai lembaga suprastruktur di aras lokal, maka di desa akan ada lembaga infrastruktur di aras lokal yang biasanya terepresentasi dalam bentuk parpol, itu yang tidak jalan. Saya melihat PKS (Partai Keadilan Sejahtera) mulai menggarap itu, sementara partai yang lain belum.

R : Bagaimana dengan partai Golkar yang selama ini memang melintang di desa karena juga ditopang kebijakan floating-mass?

KS : partai Golkar belum menunjukkan niat untuk memberdayakan infrastruktur di aras desa. Misalnya ada HWK (Himpunan Wanita Karya) atau kaderisasi atau bagaimana dia menampung aspirasi yang betul-betul kemudian menangkap sebagai infrastruktur lokal itu tidak ada. Sebagai contoh di Kauman Kidul ada HWK bentukan Golkar, ternyata dalam kiprah politiknya hampir bisa dikatakan semua anggota HWK lebih memilih PKB. Dengan demikian HWK ini bukan dibentuk dan selanjutnya dipergunakan untuk menampung dan memperkuat infrastruktur tetapi sekadar dibentuk dan kebetulan saja ada yang *ngopèni* (Jawa: memelihara). Sedangkan kalau di wilayah lain lembaga sejenis ini belum ada sama sekali. Ini sebenarnya kesalahan Golkar sendiri ketika mengembangkan *floating-mass*, tetapi dia sendiri salah memanfaatkan momentumnya yakni sebelum reformasi. Golkar sebenarnya memiliki momen yang bagus untuk masuk, tetapi tidak digunakan dengan benar. Dia lebih memanfaatkan media HWK sebagai kaderisasi untuk memperkuat rezim, tetapi tidak dalam rangka membentuk infrastruktur politik. Lalu, ketika reformasi dia tidak berani lagi masuk. Kalau kita periksa, dalam lima tahun terakhir ini semua partai mengambang semua. Golkar tidak

masuk. Saya menduga bahwa ketidakberanian Golkar masuk arena teritori desa ini lebih disebabkan karena ada rasa bersalah di samping jumlah pendukungnya kian surut, sehingga kalau dia masuk ke desa dia menjadi ragu-ragu. Tetapi dengan sekarang perolehan partai Golkar naik lagi – walaupun persentasenya juga turun, tetapi relatif proporsinya lebih tinggi ketimbang yang lain, maka saya kira dia akan masuk bukan dalam rangka memperkuat rezim partai tetapi juga memperkuat infrastruktur. Itulah beberapa pemikiran yang mestinya dikembangkan oleh partai dalam rangka memperkuat infrastruktur politik di aras lokal untuk pengembangan desa. Jadi, pengembangan infrastruktur politik desa dapat memanfaatkan peran BPD – tidak semuanya bagus tergantung pada kepemimpinan, kini ada kesempatan dengan kehadiran partai Golkar yang perolehannya naik lagi dan sejumlah partai ideologis lain yang seharusnya bisa memperkuat infrastruktur untuk menghidupkan sistem politik di desa.

R : Peran partai jelas tidak mengembangkan pendidikan politik, bagaimana komentarnya?

KS: Pada prinsipnya pendidikan politik di aras desa harus dilakukan. Contoh yang bagus terjadi di Kalibening ada 11 ranting partai dari 23 partai yang terdaftar di Kota Salatiga di dalam sebuah kelurahan. Dan, hal ini bukan karena perpindahan dari status desa ke kelurahan, tetapi karena konflik politik di aras lokal. Ketika Pak Abda yang semula menjadi panutan itu berpindah, lalu lari ke satu partai yang dianggap partai yang berbau Kristen (PKPI – Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, karena tokohnya Kasmun). Sebab itu, bagi konstituen Pak Abda ini dianggap sebagai suatu fenomena yang aneh. Inilah sebabnya kemudian momentum ini dipergunakan untuk masuknya semua partai, khususnya partai Islam semuanya ada (PKS, PAN, PKB, PNU, PBB) selain Golkar, dan partai Demokrat juga masuk. Sedangkan Di

hampir tidak ada. Kalaupun ada ranting partai tetapi kehadirannya tidak jelas. Memarang, ranting-ranting parpol tadi memiliki papan nama desa dan benar tidak berbuat sekedar papan nama, maka infrastruktur pada aras lokal ini akan juga mengembangkan bukan saja pendidikan politik, tetapi sistem politik di desa juga semakin dinamis. Dinamika politik ini sudah terjadi di Kalibening, ketika Pak lurah mengambil kebijakan, terkait dengan dua pedukuhan yakni: Dukuh Tegalsari dan Dukuh Kalibening. Dukuh Tegalsari jumlahnya kurang dari 1/3 jumlah total penduduk. Lalu ketika ada uang jatah pembangunan sebesar Rp 100 juta, Pak lurah bilang “40 bagian untuk Tegalsari dan 60 bagian untuk Kalibening.” Hal ini diputuskan secara individu sebagai kepala kelurahan. Keputusan ini kemudian diprotes. Akhirnya di antara mereka (Komunitas Pedukuhan Kalibening dan Tegalsari) muncul kesepakatan menjadi 1 dan 3 sesuai dengan proporsi jumlah penduduk. Dulunya memang proporsi jumlah penduduk 40 (Tegalsari) dan 60 (Kalibening). Jadi dalam hal ini ada keputusan Kepala Desa yang ditolak. Dalam hal penolakan ini ini muncul bukan karena adanya sejumlah ranting parpol, karena ranting masih sibuk. Saya mempunyai harapan bahwa ranting ini akan menjadikan infrastruktur politik di desa bisa mulai hidup pada pemilu yang akan datang.

R : Bagaimana dengan posisi infrastruktur politik bekas desa di Salatiga, apakah lebih baik atau bagaimana?

KS : Yang menjadi masalah adalah bahwa infrastruktur politik di aras lokal itu diterapkan di tingkat kelurahan, maka sebetulnya pengambilan kebijakan di tingkat kelurahan itu tidak ada, sehingga dia (kelurahan) kehilangan musuh dan berbeda dengan di desa ada musuh rakyat/BPD yakni Pak lurah. Dalam hal ini (di desa) musuh dari *civil society* jelas pada ranah negara di aras lokal. Sedangkan di kelurahan,

menjadi sangat penting untuk mengembangkan *civil society* dalam cakupan kabupaten. Tugas pemberdayaan *civil society* ini menjadi kian relatif lebih berat dibandingkan dengan di desa. Sebab itu, kalau ini jadi maka pengembangan infrastrukturnya di tingkat kota. Sebab itu, ranting-ranting partai atau PAK (pengurus partai tingkat kecamatan) inilah yang harus dikembangkan partai sampai pada tingkat kota. Sementara, inilah yang belum ada. Yang ada sekarang ada adalah kalau ada kasus protes dari masyarakat lokal langsung ke kabupaten walaupun ada itu tidak digerakkan oleh partai, padahal ini mestinya menjadi tugas partai. Sementara ii, munculnya kasus-kasus pada aras lokal yang kemudian dinaikkan pada level kabupaten lebih banyak disponsori oleh LSM dan oleh tokoh masyarakat tertentu. Di Kalibening misalnya, agenda air dan pembangunan jalan, dia bisa langsung melakukan karena lurah menghindar atau kini bukan menjadi sasaran tembak lagi dari *civil society*. Tetapi, jika kelurahan menghambal kebijakan terlalu berani maka dia akan memperoleh resistensi. Sebab itu, seharusnya kota seharusnya menjadi lebih matang, karena musuhnya bukan lagi pada aras desa. Bukan berarti musuh dalam arti dibunuh, tetapi lebih sebagai *sparing partner*-nya. Sebab itu *civil society* di aras kelurahan harus memiliki pandangan yang agak luas, tidak lokal sekali.

R : Apakah ada cara khusus untuk mempromosikan CS (*civil society*) di aras kota?

KS : Memang yang sulit itu adalah mengkoordinasi gerakan-gerakan CS yang lintas desa/kelurahan. Hal ini dimungkinkan jika ada permasalahan yang statusnya lintas desa juga, misalnya sumber air, gerakan penghijauan, pembuatan jalan atau apa saja. Tetapi program-program pada tingkat kota itu arahnya juga

berani juga untuk membangun sendiri atau pertimbangan masyarakat desa. Ini yang harus dikembangkan dan yang harus ada adalah koordinasi atau kerjasama antar gerakan-gerakan social pada aras bawah. Infrastruktur di aras bawah belum jalan. Kita akan melihat sesudah pemilu ini apakah kerjasama antar partai ini ada atau tidak. Untungnya sekarang partai ini tidak lagi terlalu ideologis, maksudnya konstituen kini tidak lagi terlalu fanatik. Bahwa kalau saya PKB lalu tidak mau tahu dengan PBB, tetapi orang juga sadar mmissalnya seorang berkampanye dengan bisa memiliki beberapa kaos partai – kampanye PDIP ikut, kampanye Partai Demokrat ikut, dan macam-macam itu, itu dianggap sebagai hal umum. Orang tidak menjadi masalah ketika dia berpindah partai, sehingga bagi wilayah-wilayah yang tidak tegang maka kerjasama antar infrastrukturnpartai di aras lokal sebetulnya sudah relatif lebih terbuka.

R : Jika di kelurahan ada lembaga semacam LKMD (Lembaga Ketahanan Kasyarakat Desa) yang identik dengan BPD, bagaimana sebenarnya peran ideal lembaga legislatif pada aras kelurahan sebaiknya dikembangkan?

KS : Fungsi LKMD di tingkat kelurahan dapat dikatakan tidak jalan dan juga terlalu kecil. Sebenarnya yang harus dikembangkan misalnya – memang harus muncul dari bawah, adalah semacam Dewan Kelurahan seperti Kelurahan Kalicacing yang merepresentasi komunitas perkotaan. Sementara itu, wilayah pemekaran dari desa ke kelurahan nuansa desanya masih begitu kental ketimbang nuansa urbannya, sehingga jika wilayah-wilayah pemekaran tersebut dikembangkan kelembagaan seperti Dewan Kelurahan maka itu terlalu kecil. Lebih baik kelembagaan tidak diarahkan ke arah Dewan Kelurahan, melainkan lebih kepada koordinasi antar kelurahan yang selanjutnya

kelurahan kemudian lebih ditempatkan untuk menangani masalah teknis administratif. Sedangkan soal pembangunan dan penerapan kebijakan apapun harus diserahkan ke RT/RW. Dengan demikian fungsi lurah hanya menyalurkan saja anggaran pembangunan ke institusi RT/RW. Kelurahan kemudian tidak boleh campur tangan dalam mengalokasikan dana pembangunan ke wilayah-wilayah tertentu, tidak boleh ini dan itu. Sebab itu, dengan fungsi teknis administratif jika kemudian di kelembagaan di bagian bawah ada korupsi, maka dia tinggal membuat pelaporan. Sifat "saluran teknis administratif" kelurahan mestinya bersih. Dengan demikian kelurahan tidak dianggap tidak penting bagi masyarakat, paling hanya melayani pengurusan KTP, kelakuan baik, itu saja. Apalagi kini penempatan pejabat lurah yang ada di kota berasal dari orang luar kelurahan tersebut, bukan asli warga setempat. Di Kalibening hanya ada satu orang yang ditempatkan di Kelurahan dan bukan pejabat struktural yang bereselon rendah. Dengan demikian kekuatan interaksi *face to face* yang semula menjadi kekuatan desa untuk melakukan pembangunan – sebagaimana desa yang lama – tidak lagi muncul. Jarang ada *sonjo* (ikut merasakan apa yang mesti dibangun), sehingga ketika kemudian ada permasalahan yang muncul, mereka tidak peduli. Kini, birokrat tersebut hanya datang ke kelurahan, mengurus administrasi, dan kemudian menjadi sangat birokratis dengan urusan administrasinya. Memang catatan administrasinya menjadi bagus. Dalam posisi seperti itu, kelurahan jangan dianggap sebagai apa-apa lagi, hanya sebagai sebuah lembaga yang membantu secara administratif. Sedangkan kebutuhan masyarakat kelurahan harus diputuskan oleh warga sendiri, yang mestinya dapat diakomodasi oleh Dewan Kelurahan untuk kawasan kelurahan yang mewakili komunitas kota. Kelurahan bekas desa belum terlalu membutuhkan dewan kelurahan, tetapi lebih membutuhkan lembaga RT/RW.

adalah peran RT/RW.

R : *Di Desa ada peran patronase besar. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pergeseran status dari wilayah desa ke statis kelurahan?*

KS : Patronase kepemimpinan muncul karena banyak sebab. Sebenarnya yang terjadi di desa itu sedikit sekali pemimpin yang muncul karena kewibawaan atau kharisma. Tetapi yang muncul adalah pemimpin yang menjadi patron karena amanat Undang-Undang dan jabatan yang ditempelkan, "Itu pak Dukuh. Itu Pak Carik (Sekretaris Desa). Itu Pak Lurah." Di aras kelurahan sebagian besar sudah seperti itu fenomenanya, misalnya pemilihan kepala desa dan pemilihan sekretaris desa tidak lagi murni karena prakarsa atau otoritas lokal, tetapi sudah ada bermacam-macam intervensi dari luar desa. Sehingga tidak bisa lagi dibayangkan bahwa desa atau kelurahan fenomena patronase hidup karena kharisma seseorang, tetapi patronase hidup karena tempelan. Contohnya adalah ketika desa diubah menjadi kelurahan, kita menduga akan terjadi kehilangan patron dan itu akan menyusahkan masyarakat. Tetapi kenyataannya tidak, karena kemudian muncul jabatan lain yakni RT/RW yang kemudian menjadi lebih dihargai masyarakat. Contoh lain adalah patronase yang dikembangkan oleh pak Abda sebagai sosok yang ditakuti masyarakat dari Kalibening ketika Kalibening PPP melawan Golkar, maka semua warga menjadi PPP. Ketika dia berorientasi PKB, semua ikut PKB. Tetapi, ketika dia pindah ke PKPI, maka di sana kekuatan Pak Abda menjadi pecah. Jadi dalam hal ini kharisma Pak Abda dibangun karena ke-Islamannya itu dan ketika warna ke-Islamannya berbeda karena memilih partai yang dianggap Kristen, maka patronase ini mulai ditinggal. Sebab itu, apa yang disebut sebagai patronase itu bukanlah sebuah harga mati, tetapi tergantung kepada rasionalitas yang dibangun

Kalaupun *toh* sekarang Pak Abda memiliki pendukung itu karena dia memainkan praktik uang dan intimidasi. Sedangkan yang lain tidak mempan lagi dipengaruhi dengan intimidasi dan politik uang.

Dalam hal ini ketika desa menjadi kelurahan, rakyat tidak kehilangan patron karena kemudian muncul patron-patron baru. Dan patron baru ini muncul karena bukan karena kekuasaannya, tetapi lebih dianggap sebagai pelayan. Kalau dulu Pak Lurah dipandang sebagai panutan, tetapi Pak RT/RW dianggap sebagai pelayan. Maksud saya ada banyak RT yang sebenarnya tidak mau menjabat lagi karena lelah dan tidak mendapat apa-apa. Sehingga kalau ada orang yang mau maka kita akan senang karena dia rela berkorban.

R : *Pola patronase mengandaikan bahwa sumber kekuasaan berasal dari atas. Kini diketahui bahwa dengan munculnya rasionalitas baru dari kleinnya, maka kekuasaan juga bisa muncul dari aras bawah?*

KS : Saya sebenarnya setuju dengan pandangannya Bernei dan Budiono yang mengenalkan munculnya kekuasaan yang dari bawah. Sekarang dengan pola pemilihan pimpinan secara langsung, nanti bahkan walikota dan bupati juga akan dipilih langsung, mau tidak mau maka legitimasi akan berasal dari bawah. Sebab itu masalah kepemimpinan mau tidak mau harus mendasarkan kepada konstituen. Trend ini harus diawasi betul. Yang harus dicermati adalah *civil society* dari aras bawah ini harus menyadari tentang makna legitimasi kekuasaan itu. Jadi tidak sekedar hadir sebagai pemrotes dan *counter balance*, tetapi harus memaknai bahwa posisi dirinya adalah pada posisi lebih di atas dan berkuasa. Penguasa harus diatur. Saya semakin yakin bahwa *civil*

society bukan sekedar media untuk ketemu, tetapi lebih sebagai institusi yang tidak lagi yang posisinya sejajar lagi, tetapi kekuasaan rakyat memang harus lebih tinggi ketimbang wakil rakyat di legislatif dan pemerintahan. Memang pada zamannya Pak Harto, posisi rakyat hanya sekedar sebagai komplemen, mendukung, menempel pada kekuasaan. Namun ketika reformasi datang, gerakan *civil society* mulai meralisasikan protes, *rational discourse*, tetapi kemudian seharusnya juga pada posisi di atas legislatif dan birokrasi. Makna demokrasi yang selama ini kita pikirkan yang kemudian berhadapan dengan penguasa, memang harus dipikirkan apakah penguasa harus duduk bersama sejajar dengan kekuasaan rakyat. Itu harus dipikir ulang bagaimana legitimasi kekuasaan dan yang mempunyai kekuasaan bisa melegitimasi. Sehingga kontrol arogansi dari wakil rakyat harus ditekan sedemikian rendah, misalnya ketika Formalisa¹ ketemu dengan Kasmun terkait dengan agenda pengadaan *incenirator* (alat pembakar sampah kota). Apa yang dilakukan dan dikatakan Kasmun adalah "Itu kan sudah dianggarkan, jadi harus dibeli." Yang menganggarkan siapa? Dia sendiri sebagai DPR Kota! Karena sudah dianggarkan maka logikanya harus dibeli. Ini merupakan logika yang *kuoso-kuosonan* (*sok berkuasa, red*). Sementara, Formalisa dan LSM pada posisi protes. Jika kemudian Formalisa tidak sekedar dikembangkan sebagai forum, tetapi representasi seluruh massa, maka dia harus ada di atas, maka legislatornya harus *manut*. Posisi demkrasinya memang ketika mau begini, lalu yang muncul seringkali karena tidak puas dengan kekuasaan negara, lalu demokrasi *kebablasan* dengan ruangnya bukan yang kriminal. Tetapi bagaimana dia bisa mengaktualisasikan dengan cara yang benar?

R : *Apa ada strategi khusus untuk menghadapi arogansi legislator, smementara*

¹ Formalisa adalah sebuah forum masyarakat peduli lingkungan di Kota Selatiga yang di dalamnya terdapat anggota

kini kondisi civil society organization/NGO terkesan berjalan sendiri-sendiri?

KS: Kalau dengan mengusung contoh Formalisa, maka itu harus menjadi suatu gerakan yang sifatnya regional, yang mestinya dikembangkan oleh semua LSM, seperti Percik, Trukajaya dan juga universitas. Bisa saja gerakan itu dimulai dengan bentuk seminar, kampanye, dan berujung dalam bentuk perumusan hasil publikasi. Selama ini, agenda-agenda yang mesti dikerjakan oleh elemen-elemen gerakan sosial tersebut belum ada. Saya sementara ini berperan mencoba mendorong sejumlah personal yang ada LSM bahkan di universitas untuk mencoba melakukan percakapan di luar menggelindingkan gerakan sosial yang dimulai dari kelompok kecil. Kendati kelompok ini kecil, jika gaungnya kuat akan melebar gerakan ini ke aras regional bahkan ke aras nasional. Itulah yang mestinya kita lakukan adalah dalam bentuk omong bersama.

Bila dikaitkan dengan kasus pemilu, masalah kontrak politik yang dibuat oleh beberapa caleg merupakan pola yang bagus. Dengan demikian, rakyat sebagai basis konstituen akan dengan mudah akan menghukum bila sang legislatif yang jadi itu korup dan dia harus mundur dengan cara menunjukkan kontrak politik yang telah ditandatangani, walau ada juga caleg yang tidak mau menandatangani kontrak.

Hal yang lain adalah peran partai. Celaknya memang partai itu dikuasai oleh legislatif juga. Misalnya saja — sekadar menunjuk contoh Sdr Ibu Djatmiko sebagai Ketua PDIP Kota Salatiga dan Sdr. Kasmun menjabat sebagai Ketua PKPI — pemimpin partai sekaligus merangkap sebagai legislator. Dengan demikian jika mau mengontrol kinerja legislatif, maka praktik jabatan rangkap pimpinan parpol dan legislator harus dihilangkan dahulu, sehingga partai memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan tindakan misalnya *recall*, pergantian antar waktu, kontrol yang ketat terhadap legis-

tindakan ini bisa dijalankan. Tetapi, hampir semua legislatif pada saat sekarang menjabat sebagai ketua partai. Dengan kata lain, jika memang ada ketentuan larangan jabatan rangkap, maka partai kemudian akan menjadi kekuasaan konstituen. Jika masih saja terjadi praktik jabatan rangkap, maka akan ada kesulitan partai mengontor sang legislatif. Benar, memang persoalan rangkap jabatan menyangkut juga soal rejeki. Megawati Soekarnoputri yang ada di pucuk pimpinan PDIP, misalnya, melakukan praktik jabatan rangkap.

R: *Agenda rangkap jabatan merupakan kendala yang mesti ditinjau kembali pada aras pusat. Namun, bagaimana dengan kemungkinan membangun aliansi strategis di antara CSO?*

KS: Berkaitan dengan penghilangan jabatan rangkap partai mesti dihilangkan pada aras nasional. Persoalannya kemudian bagaimana kemudian mencoba mempersatukan publik apakah bisa dilakukan. Sementara dengan mengambil sebuah ilustrasi untuk Kota Salatiga, kini masih saja ada ketegangan antara Percik dan Satya Wacana dalam membangun dialektika — walaupun beberapa orang masih bisa melintasi arena dielektika. Jika ketegangan di atas mencuat, maka dalam merancang sebuah agenda duduk bersama maka akan terasa seperti ada blok atau pembatas ketika kemudian muncul sebuah masalah. Sementara jika ada masalah mestinya semua pihak dalam jajaran CSO ini bisa duduk bersama dan berdialog secara penuh. Dengan demikian akan memberikan dampak yang besar, apalagi kota Salatiga adalah sebuah kota yang kecil. Jika dikaitkan dengan kehadiran dengan banyaknya LSM dan beberapa perguruan tinggi, kondisi ini merupakan kondisi ideal untuk maju. Saya tidak tahu bagaimana aliansi antara LSM-LSM dan perguruan tinggi tidak sempat muncul.

CSO yang pada saat yang sama juga berbaju sebagai politisi dan pelaku pasar?

KS : Dengan mengambil Formalisa sebagai sebuah model, memang disadari bahwa ada bermacam-macam aktor yang terlibat di dalam Formalisa. Ada yang berwajah jamak seperti dalam diri seorang aktor dalam dirinya adalah seorang pengusaha, tokoh partai, dan sekaligus masuk sebagai komunitas aliansi seperti Formalisa. Saya memang dalam pendirian awal Formalisa memang sempat mengambil peran bersama Danny Zacharias, walaupun kemudian saya keluar dari forum tersebut. Fenomena kehadiran seseorang dengan banyak peran memang merupakan kenyataan, yang sebetulnya sangat tergantung bagaimana kemudian kita bertarung di dalamnya. Karena kalau semua pihak sadar maka bisa saja ada konflik. Misalnya di Formalisa ada Ibu John Manoppo – yang menggunakan Formalisa untuk batu loncatan sebagai caleg. Tetapi toh secara organisatoris Formalisa itu berani melakukan koreksi. Pola koreksi seperti ini jika kemudian bisa dikembangkan oleh banyak pihak dan melupakan kemungkinan soal “penyusupan”, tinggal selanjutnya mengembangkan arena rasionalitas apakah benar atau tidak.

Kalau dikaitkan dengan kemungkinan LSM bisa menelorkan kebijakan publik, seharusnya kalau komunitas semacam ini dikembangkan, maka semenjak rancangan perda (Raperda) sudah harus menjadi pokok bahasan aliansi di atas. Selama ini, proses penyiapan raperda itu sendiri kita tidak pernah tahu dan tahu-tahu perdanya sudah keluar. Ketika Perda jadi, maka kita ribut. Mestinya kita tidak semata-mata reaktif, tetapi bisa mencegah sebelumnya, bahkan kita bisa mengusulkan misalnya untuk mendukung salah satu caleg – seperti Mas Harris yang dianggap sebagai calon legislator yang rasional dan menolong menyampaikan aspirasi kita. Bagi saya, komunitas *civil society* adalah

di atas menjadi yang lebih atas. Misalnya setiap Raperda jika mau diproses selanjutnya perlu memperoleh lampu hijau dari aspirasi aliansi *civil society* ini. Kalau tidak ada lampu hijau maka mungkin raperda tersebut akan menjadi permasalahan. Lantas, bagaimana kemudian membentuk gerakan dengan model aliansi ini? Idealnya aliansi yang dimaksud disiapkan sebagai suatu forum, yang bagi siapa saja bisa keluar dan masuk. Sebab itu, jika kemudian organisasi ini diketatkan bisa dipakai oleh seseorang untuk mengambil keuntungan. Tetapi, kalau kemudian longgar maka kemudian tinggal sekarang bagaimana membangun rasionalitas di dalam dan kalau tidak setuju dengan rasionalitas yang disepakati bersama, silahkan keluar.

R : *Kalau kasus Formalisa organisasinya sangat jelas dan kemudian saling mengambil keuntungan, ada ketegangan, dan kemudian buntu dan beku. Ada komentar?*

KS : Memang dalam dialog terakhir ada protes keras dari Sdr. Bahruddin dan dia ada di situ. Saya meminta Mas Warto (aktivis Formalisa dari Trukajaya, *red.*) untuk mengkoordinasi itu. Pak Adjar Subadi (Dosen UKSW, menjabat sebagai Ketua Formalisa, *red.*) sebenarnya juga sebenarnya berminat untuk mencairkan kebekuan itu. Mungkin karena masih dalam suasana Pemilu. Mungkin saja kemudian agenda ini bisa diangkat dengan Percik, Pusat Studi Lingkungan Satya Wacana, Qorryah Thoyibah, Formalisa dan segala macam, mengadakan suatu pertemuan, tanpa harus mengeluarkan dana besar, tetapi agenda ini dijadikan sebagai kebutuhan bersama. Apakah ini bisa atau tidak?

R : *Jika di atas telah diidealkan munculnya sebuah gerakan yang dapat melahirkan suatu bentuk kampanye, seminar, publikasi, pertanyaannya kemudian mengapa hal itu tidak dengan sendirinya terbentuk?*

KS : Masalahnya adalah, *pertama*, hampir semua pihak berpikiran bahwa untuk data menggerakkan semua itu diperlukan dukungan dana yang besar. *Kedua*, siapa yang mau mengkoordinir. Lazimnya sudah terbentuk opini bahwa yang mengkoordinirlah yang dianggap memiliki duit. Yang sedang saya imajinasikan adalah apakah dimungkinkan untuk memunculkan prakarsa seperti di atas diperlukan pada masing-masing pihak adalah kesadaran. Kesadaran akan muncul jika ada kebutuhan bersama. Sehingga misalnya Bahrudin yang getol menolak itu bisa menjadi koordinator. Soal dana, kita bantingan saja bahkan bisa berasal dari mana-mana, itu masih

bisa. Hanya saja sampai sekarang kita belum pernah ketemu. Sekarang kegiatan sudah mulai surut, mungkin bisa segera dimulai kegiatannya lagi. Orang-orang partai yang kemudian mencalonkan kembali dan kemungkinan besar jadi, akan menjadi sosok yang berbahaya karena ia akan mencoba membayar dan ia butuh uang untuk menarik kembali. Peran aliansi ini adalah bagaimana mencegah para legislator yang jadi ini untuk tidak memeras rakyat. Program besar regionalnya adalah bagaimana kita mengawasi legislator tadi agar tidak menggunakan kewenangannya untuk memeras rakyat. Salah satu contohnya adalah program pengadaan *incinerator*. Ini harus cepat diantisipasi.

